

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis Politik Visual (*The Politics of the Visual*) terhadap serial *The Diplomat* musim pertama dan kedua, penelitian ini menyimpulkan bahwa serial tersebut secara komprehensif mengonstruksi *Feminist Foreign Policy* (FFP) sebagai narasi alternatif melalui yang menantang hegemoni realisme maskulin dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat melalui Politik Visual proses produksi, representasi, dan konsumsi. Jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini dapat ditarik melalui tiga dimensi diskursif utama: Produksi, Representasi, dan Konsumsi.

Pertama, dari dimensi Produksi, narasi alternatif ini dibangun secara strategis melalui intervensi kreatif *showrunner* perempuan, Debora Cahn, yang memprioritaskan pengalaman empiris para diplomat karier perempuan nyata sebagai cetak biru (*blueprint*) narasinya. Absennya kerja sama formal dengan Departemen Pertahanan AS (DoD) menjadi pernyataan sikap politik yang secara sadar menolak glorifikasi militerisme dan penyelesaian konflik melalui hard power yang selama ini mendominasi budaya populer Hollywood. Sebaliknya, kolaborasi lunak dengan Kementerian Luar Negeri (Department of State) menegaskan fokus serial ini pada kerja diplomasi preventif dan substansial yang menjadi fondasi dari FFP.

Kedua, dari dimensi Representasi (Tekstual dan Visual), *The Diplomat* mengartikulasikan FFP melalui karakter Duta Besar Kate Wyler yang secara persisten menempatkan keamanan manusia (*human security*) dan de-eskalasi di atas ego kepemimpinan dan optik politik negara. Melalui proses pengambilan keputusan, Kate menolak eufemisme diplomatik yang memanipulasi penderitaan kelompok marjinal, menentang mentalitas permainan menang-kalah, dan berani membongkar bias gender institusional seperti jebakan *glass cliff* dan tokenisme. Secara visual, serial ini mendekonstruksi *aesthetic labor* dan *male gaze* melalui politik tubuh, di mana preferensi anti-fashion Kate, seperti penggunaan setelan jas hitam yang berfungsi sebagai armor dan penolakan terhadap rutinitas tata rias,

menjadi bentuk perlawanan radikal terhadap objektifikasi figur publik perempuan. Namun, serial ini juga menghindari romantisasi buta dengan menampilkan kontestasi ideologis yang tajam. Kehadiran karakter perempuan seperti Wakil Presiden Penn yang merepresentasikan *militarized femininity* membuktikan bahwa sekadar menempatkan perempuan di pucuk kekuasaan tidak serta-merta menjamin terwujudnya nilai feminis apabila figur tersebut masih menginternalisasi dan mengoperasikan paradigma realisme yang kejam.

Ketiga, dari dimensi Konsumsi, respons audiens menunjukkan bahwa serial ini mencerminkan kekhawatiran publik terhadap kondisi politik AS saat ini. Di satu sisi, sosok rasional seperti Kate menjadi *wish fulfillment* (pemenuhan harapan) bagi penonton yang mendambakan pemimpin kompeten di tengah maraknya tren politisi populis. Namun di sisi lain, audiens kritis melihat adanya standar ganda; meskipun serial ini berusaha memanusiakan diplomasi, pendekatan protektif yang dilakukan sering kali bergeser menjadi militerisme berkedok kemanusiaan, yang secara implisit tetap mereproduksi dan melegitimasi hegemoni imperialis AS di panggung internasional.

Sebagai konklusi akhir, Politik Visual FFP dalam *The Diplomat* mencerminkan realitas kebijakan luar negeri AS yang sesungguhnya: sebuah sistem yang secara historis masih terjebak dalam ilusi militerisme maskulin dan ambiguitas birokrasi. Serial ini membuktikan bahwa nilai-nilai feminisme yang diabaikan dalam teks resmi negara justru menemukan ruang hidupnya dalam budaya populer.

Mengingat narasi fiksi ini masih terus berlanjut dan belum memberikan resolusi final mengenai keberhasilan absolut dari pendekatan FFP nya, *The Diplomat* justru secara autentik menolak romantisasi dan glorifikasi pahlawan super. FFP tidak dihadirkan sebagai solusi instan yang menjanjikan resolusi final yang bersifat absolut, melainkan diproyeksikan sebagai sebuah proses negosiasi yang persisten, melelahkan, dan penuh kompromi pragmatis di balik layar. Melalui visualisasi perjuangan tanpa akhir inilah, *The Diplomat* tidak sekadar berfungsi sebagai fiksi hiburan, melainkan sebagai sindiran tajam atau satir yang menawarkan sebuah *blueprint* nyata: bahwa *Feminist Foreign Policy* bukanlah sebuah utopia akademis yang naif, melainkan sebuah kerangka tata kelola strategis yang sangat realistis,

sebuah upaya berkelanjutan yang esensial untuk mencegah tatanan global dari ancaman kehancuran akibat dominasi *hard power*.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini, penulis menyampaikan beberapa saran yang ditujukan baik untuk pengembangan kajian akademis di bidang Hubungan Internasional, khususnya dalam studi Politik Visual dan gender, maupun untuk kebutuhan praktis para pemangku kepentingan yang berkaitan dengan perumusan kebijakan luar negeri dan diplomasi publik. Saran ini diharapkan dapat menjadi masukan konstruktif bagi penelitian selanjutnya serta panduan bagi para pengambil keputusan dalam menavigasi dinamika politik global yang semakin termediasi secara visual.

6.2.1 Saran Akademis

Secara akademis, penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan literatur Hubungan Internasional, khususnya dalam kajian Politik Visual yang menyoroti hubungan antara budaya populer, representasi gender, dan narasi kebijakan luar negeri. Melalui analisis mendalam terhadap serial *The Diplomat*, penelitian ini menghadirkan beberapa manfaat akademis yang memperkaya diskursus teoretis maupun metodologis dalam studi narasi alternatif *Feminist Foreign Policy* (FFP).

Penelitian ini menunjukkan bahwa teori *The Politics of the Visual* tetap sangat relevan untuk memahami bagaimana kekuasaan internasional dinegosiasikan di luar dokumen resmi negara. Temuan penelitian menegaskan bahwa gambar dan narasi fiksi tidak sekadar merefleksikan realitas politik, tetapi secara aktif mengonstruksi akal sehat (*common sense*) publik mengenai siapa yang berhak memegang otoritas diplomatik. Dengan demikian, penelitian ini memperluas penggunaan perangkat analitis Rowley (2010) yang membagi proses diskursif ke dalam dimensi produksi, representasi, dan konsumsi untuk membedah bagaimana ide-ide feminis diartikulasikan dan dikontestasikan dalam ruang digital.

Penelitian ini turut memberikan kontribusi teoretis melalui pengoperasionalisasian kerangka *5R Feminist Foreign Policy (Rights, Representation, Resources, Research, Reach)* milik Thompson (2020) dalam sebuah teks budaya populer. Analisis ini memetakan bagaimana FFP tidak hanya muncul melalui dialog kebijakan, tetapi juga melalui politik tubuh dan dekonstruksi *aesthetic labor* yang selama ini mendisiplinkan diplomat perempuan. Temuan ini membuka ruang diskusi baru mengenai bagaimana perlawanan visual dapat menjadi instrumen strategis untuk menantang maskulinitas hegemonik di ruang *high politics*.

Penelitian ini juga memberikan kontribusi kritis terhadap literatur yang cenderung meromantisasi keterlibatan perempuan di pucuk kekuasaan. Dengan mengintegrasikan kritik dari Pears (2025) mengenai *mothering logic* dan militerisme berwajah feminis, penelitian ini menantang asumsi bahwa kehadiran fisik perempuan secara otomatis mengubah sifat kekerasan negara. Kontribusi ini memperkaya kajian kritis yang berfokus pada risiko internalisasi paradigma Realisme oleh aktor perempuan guna mendapatkan legitimasi institusional.

Secara metodologis, penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat melampaui analisis tekstual dan visual dengan menggunakan metode studi audiens empiris secara langsung, seperti wawancara mendalam atau *Focus Group Discussion* (FGD) dengan praktisi diplomat nyata untuk mengukur resonansi narasi fiksi ini terhadap perilaku profesional mereka. Selain itu, penggunaan lensa Poskolonialisme disarankan untuk membedah lebih jauh bagaimana orientasi kebijakan dalam serial ini tetap mereproduksi *American Exceptionalism* di tengah balutan progresivitas gender.

6.2.2 Saran Praktis

Selain memberikan saran dalam ranah akademis, penelitian ini juga menghasilkan sejumlah manfaat praktis yang dapat digunakan sebagai rujukan bagi para pembuat kebijakan, diplomat, maupun pelaku industri kreatif. Temuan penelitian ini diharapkan mampu menjadi dasar

pertimbangan dalam merumuskan strategi diplomasi publik yang lebih inklusif serta membantu pemangku kepentingan untuk memahami kekuatan naratif budaya populer dalam membentuk citra negara di panggung internasional.

Penelitian ini memberikan pelajaran penting bagi perumus kebijakan mengenai pentingnya menyadari hambatan struktural seperti *glass cliff* dan *double bind* yang masih membebani diplomat perempuan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa representasi yang autentik dan tidak terpoles justru mendapatkan resonansi positif dan validasi dari audiens ahli maupun praktisi di lapangan. Oleh karena itu, institusi diplomasi disarankan untuk mulai mengurangi standarisasi *aesthetic labor* yang kaku dan lebih fokus pada penguatan otoritas intelektual serta perlindungan hak-hak dasar diplomat perempuan di zona konflik sebagai prasyarat utama FFP.

Bagi para pembuat kebijakan diplomasi publik, penelitian ini menegaskan bahwa penggunaan produk budaya populer dapat menjadi aset strategis untuk mengedukasi masyarakat mengenai kompleksitas kerja diplomasi yang rasional dan preventif. Namun, para praktisi perlu berhati-hati agar tidak terjebak dalam praktik tokenisme atau menjadikan isu gender sekadar sebagai alat propaganda (*weaponized femininity*) untuk menutupi kegagalan kebijakan. Kredibilitas diplomasi digital suatu negara di masa depan akan sangat bergantung pada koherensi antara narasi progresif yang ditampilkan di layar dengan praktik kebijakan luar negeri yang nyata di lapangan.

Bagi praktisi di industri media dan kreatif, penelitian ini mengungkap pentingnya menghadirkan karakter perempuan yang kompleks dan memiliki agensi penuh tanpa harus dilemahkan demi pengembangan karakter lain. Sineas disarankan untuk menghindari kiasan *Girlboss Feminism* yang dangkal dan mulai mengeksplorasi tantangan birokrasi serta beban kognitif yang dihadapi pemimpin perempuan secara lebih realistis.

Penelitian ini juga memberikan wawasan bagi masyarakat luas dan mahasiswa Hubungan Internasional untuk memperkuat literasi media dalam melihat politik dunia. Masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi

konsumen pasif, tetapi mampu membedah bagaimana elemen visual, mulai dari gaya rambut hingga dekorasi ruang rapat, merupakan arena di mana wacana kekuasaan internasional sedang diperebutkan. Pemahaman ini krusial agar publik dapat membedakan antara komitmen tulus terhadap nilai-nilai kemanusiaan dengan strategi pencitraan politik yang bersifat artifisial.